



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk dibahas bersama, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggara Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan
WALI KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dengan laporan kinerja.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp 5.449.340.586.722,85
b. belanja	<u>Rp 6.047.219.172.842,00</u>
defisit	Rp (597.878.586.119,15)
c. pembiayaan	
penerimaan	Rp 1.146.423.416.682,23
pengeluaran	<u>Rp 0,00</u>
pembiayaan netto	<u>Rp 1.146.423.416.682,23</u>
sisa lebih pembiayaan	
anggaran tahun berkenaan	Rp 548.544.830.563,08

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp1.072.783.184.051,15), dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 6.522.123.770.774,00
 2. realisasi Rp 5.449.340.586.722,85
 - selisih (kurang) (Rp1.072.783.184.051,15)
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp1.621.501.018.646,00) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran belanja setelah perubahan Rp 7.668.720.191.488,00
 2. realisasi Rp 6.047.219.172.842,00
 - selisih (kurang) (Rp 1.621.501.018.646,00)
- c. selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp548.717.834.594,85, dengan rincian sebagai berikut:
 1. defisit setelah perubahan Rp(1.146.596.420.714,00)
 2. realisasi Rp (597.878.586.119,15)
 - selisih (lebih) Rp 548.717.834.594,85
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp173.004.031,77, dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 1.146.596.420.714,00
 2. realisasi Rp 1.146.423.416.682,23
 - selisih (kurang) Rp (173.004.031,77)
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 0,00
 2. relaisasi Rp 0,00
 - selisih Rp 0,00
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp173.004.031,77, dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp 1.146.596.420.714,00
 2. realisasi Rp 1.146.423.416.682,23
 - selisih (kurang) Rp (173.004.031,77)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2022, sebagai berikut:

- a. saldo anggaran lebih awal Rp 1.146.596.420.714,25
- b. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Rp 548.544.830.563,08
- c. saldo anggaran lebih akhir Rp 548.544.830.563,08

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2022, sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp 34.890.098.200.281,26
b. jumlah kewajiban	<u>Rp 136.660.001.544,84</u>
c. jumlah ekuitas	Rp 34.753.438.198.736,42

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2022, sebagai berikut:

a. pendapatan LO	Rp 5.455.055.087.614,11
b. beban	<u>Rp 5.196.221.341.932,85</u>
defisit	Rp 258.833.745.681,26

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022, sebagai berikut:

a. saldo awal kas per 1 Januari 2022	Rp 1.146.596.420.714,25
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp 1.019.657.226.532,85
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp (1.617.535.812.652,00)
d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp 0,00
e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp 0,00
f. saldo akhir kas di bud	Rp 548.544.830.563,08
g. kas di bendahara penerimaan	Rp 0,00
h. kas di bendahara pengeluaran	Rp 0,00
i. saldo kas akhir per 31 Desember 2022	Rp 548.544.830.563,08

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022, sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp 34.456.264.252.614,50
b. surplus/defisit LO	Rp 258.833.745.681,26
c. koreksi ekuitas lainnya	Rp 38.340.200.440,66
d. ekuitas akhir	Rp 34.753.438.198.736,42

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 2. Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 24 Agustus 2023

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 24 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN, PROVINSI SUMATERA UTARA :
(2/77-2023).

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


YUNITA SARI, S.H
Pembina
NIP. 19700622 200701 2 031



PEMERINTAH KOTA MEDAN
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4	PENDAPATAN DAERAH	6.522.123.770.774,00	5.449.340.586.722,85	(1.072.783.184.051,15)	83,55
4.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	246.292.719.125,00	156.028.712.097,82	(90.264.007.027,18)	63,35
4.1.02	KESEHATAN	241.966.719.125,00	150.952.856.152,82	(91.013.862.972,18)	62,39
4.1.02.1-02.0-00.0-00.01	Dinas Kesehatan	241.966.719.125,00	150.952.856.152,82	(91.013.862.972,18)	62,39
4.1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.796.000.000,00	2.705.088.145,00	909.088.145,00	150,62
4.1.04.1-04.1-03.2-10.01	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	1.796.000.000,00	2.705.088.145,00	909.088.145,00	150,62
4.1.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2.530.000.000,00	2.370.767.800,00	(159.232.200,00)	93,71
4.1.05.1-05.0-00.0-00.06	Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran	2.530.000.000,00	2.370.767.800,00	(159.232.200,00)	93,71
4.2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	223.873.521.695,00	103.832.118.050,00	(120.041.403.645,00)	46,38
4.2.11	LINGKUNGAN HIDUP	37.193.711.052,00	22.582.340.550,00	(14.611.370.502,00)	60,72
4.2.11.2-11.2-15.1-03.12	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	37.193.711.052,00	22.582.340.550,00	(14.611.370.502,00)	60,72
4.2.15	PERHUBUNGAN	46.684.727.735,00	28.822.785.240,00	(17.861.942.495,00)	61,74
4.2.15.2-15.0-00.0-00.01	Dinas Perhubungan	46.684.727.735,00	28.822.785.240,00	(17.861.942.495,00)	61,74
4.2.18	PENANAMAN MODAL	139.995.082.908,00	52.426.992.260,00	(87.568.090.648,00)	37,45
4.2.18.2-18.0-00.0-00.23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	139.995.082.908,00	52.426.992.260,00	(87.568.090.648,00)	37,45
4.3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	600.000.000,00	652.594.100,00	52.594.100,00	108,77
4.3.30	PERDAGANGAN	600.000.000,00	652.594.100,00	52.594.100,00	108,77
4.3.30.3-30.0-00.0-00.01	Dinas Perdagangan	600.000.000,00	652.594.100,00	52.594.100,00	108,77
4.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	6.051.357.529.954,00	5.188.827.162.475,03	(862.530.367.478,97)	85,75
4.5.02	KEUANGAN	6.051.357.529.954,00	5.188.827.162.475,03	(862.530.367.478,97)	85,75
4.5.02.5-02.0-00.0-00.01	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.453.577.820.521,00	3.212.407.111.813,03	(241.170.708.707,97)	93,02
4.5.02.5-02.0-00.0-00.02	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	2.597.779.709.433,00	1.976.420.050.662,00	(621.359.658.771,00)	76,08
5	BELANJA DAERAH	7.668.720.191.488,00	6.047.219.172.842,00	(1.621.501.018.646,00)	78,86
5.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.918.524.791.763,00	3.577.045.865.053,00	(1.341.478.926.710,00)	72,73
5.1.01	PENDIDIKAN	1.406.666.638.155,00	972.386.889.932,00	(434.279.748.223,00)	69,13
5.1.01.1-01.2-19.0-00.01	Dinas Pendidikan	1.406.666.638.155,00	972.386.889.932,00	(434.279.748.223,00)	69,13
5.1.01.1-01.2-19.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	1.245.915.570.522,00	822.343.728.473,00	(423.571.842.049,00)	66,00
5.1.01.1-01.2-19.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	810.668.382.109,00	622.320.279.626,00	(188.348.102.483,00)	76,77
5.1.01.1-01.2-19.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.644.382.896,00	120.055.869.847,00	(23.588.513.049,00)	83,58
5.1.01.1-01.2-19.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	291.102.805.517,00	79.844.980.000,00	(211.257.825.517,00)	27,43
5.1.01.1-01.2-19.0-00.01.1.06	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	122.599.000,00	(377.401.000,00)	24,52



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.7.01.7-01.0-00.0-00.19.1	BELANJA OPERASI	26.786.385.187,00	25.418.239.677,00	(1.368.145.510,00)	94,89
5.7.01.7-01.0-00.0-00.19.1.01	Belanja Pegawai	9.723.044.000,00	9.239.615.153,00	(483.428.847,00)	95,03
5.7.01.7-01.0-00.0-00.19.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.063.341.187,00	16.178.624.524,00	(884.716.663,00)	94,82
5.7.01.7-01.0-00.0-00.19.2	BELANJA MODAL	5.125.314.421,00	4.757.211.043,00	(368.103.378,00)	92,82
5.7.01.7-01.0-00.0-00.19.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	360.426.600,00	358.900.000,00	(1.526.600,00)	99,58
5.7.01.7-01.0-00.0-00.19.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.764.887.821,00	4.398.311.043,00	(366.576.778,00)	92,31
5.7.01.7-01.0-00.0-00.20	Kecamatan Medan Amplas	32.873.623.327,00	31.433.564.663,00	(1.440.058.664,00)	95,62
5.7.01.7-01.0-00.0-00.20.1	BELANJA OPERASI	28.995.809.707,00	27.709.500.099,00	(1.286.309.608,00)	95,56
5.7.01.7-01.0-00.0-00.20.1.01	Belanja Pegawai	14.045.806.000,00	13.221.637.044,00	(824.168.956,00)	94,13
5.7.01.7-01.0-00.0-00.20.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.950.003.707,00	14.487.863.055,00	(462.140.652,00)	96,91
5.7.01.7-01.0-00.0-00.20.2	BELANJA MODAL	3.877.813.620,00	3.724.064.564,00	(153.749.056,00)	96,04
5.7.01.7-01.0-00.0-00.20.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	915.149.650,00	872.505.314,00	(42.644.336,00)	95,34
5.7.01.7-01.0-00.0-00.20.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.962.663.970,00	2.851.559.250,00	(111.104.720,00)	96,25
5.7.01.7-01.0-00.0-00.21	Kecamatan Medan Sunggal	33.224.731.456,00	31.866.987.219,00	(1.357.744.237,00)	95,91
5.7.01.7-01.0-00.0-00.21.1	BELANJA OPERASI	32.466.845.136,00	31.152.479.869,00	(1.314.365.267,00)	95,95
5.7.01.7-01.0-00.0-00.21.1.01	Belanja Pegawai	13.675.888.350,00	13.471.650.344,00	(204.238.006,00)	98,51
5.7.01.7-01.0-00.0-00.21.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.790.956.786,00	17.680.829.525,00	(1.110.127.261,00)	94,09
5.7.01.7-01.0-00.0-00.21.2	BELANJA MODAL	757.886.320,00	714.507.350,00	(43.378.970,00)	94,28
5.7.01.7-01.0-00.0-00.21.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	757.886.320,00	714.507.350,00	(43.378.970,00)	94,28
5.8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	37.577.253.158,00	34.661.176.962,00	(2.916.076.196,00)	92,24
5.8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	37.577.253.158,00	34.661.176.962,00	(2.916.076.196,00)	92,24
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	37.577.253.158,00	34.661.176.962,00	(2.916.076.196,00)	92,24
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	37.495.425.858,00	34.579.776.962,00	(2.915.648.896,00)	92,22
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	6.883.653.002,00	6.529.123.834,00	(354.529.168,00)	94,85
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.742.821.036,00	4.197.198.128,00	(1.545.622.908,00)	73,09
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	24.868.951.820,00	23.853.455.000,00	(1.015.496.820,00)	95,92
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	81.827.300,00	81.400.000,00	(427.300,00)	99,48
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.827.300,00	81.400.000,00	(427.300,00)	99,48
6	PEMBIAYAAN DAERAH	1.146.596.420.714,00	1.146.423.416.682,23	(173.004.031,77)	99,98
6.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.146.596.420.714,00	1.146.423.416.682,23	(173.004.031,77)	99,98
6.5.02	KEUANGAN	1.146.596.420.714,00	1.146.423.416.682,23	(173.004.031,77)	99,98
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.146.596.420.714,00	1.146.423.416.682,23	(173.004.031,77)	99,98
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.146.596.420.714,00	1.146.423.416.682,23	(173.004.031,77)	99,98
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.146.596.420.714,00	1.146.423.416.682,23	(173.004.031,77)	99,98

WALIKOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

YUNITA SARI, SH
Pembina
NIP. 19700622 200701 2 031





PEMERINTAH KOTA MEDAN

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
4	PENDAPATAN DAERAH	6.522.123.770.774,00	5.449.340.586.722,85	83,55	5.023.080.346.608,29
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.050.594.560.414,00	2.230.554.495.746,85	73,12	1.906.512.189.047,29
4.1.01	Pajak Daerah	2.587.779.709.433,00	1.961.927.116.116,00	75,82	1.495.751.738.668,00
4.1.02	Retribusi Daerah	237.897.911.754,00	113.129.542.274,00	47,55	123.663.556.072,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.941.152.227,00	17.677.645.359,53	73,84	16.204.047.293,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	200.975.787.000,00	137.820.191.997,32	68,58	270.892.847.014,29
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.389.588.278.235,00	3.150.952.726.119,00	92,96	2.977.574.253.244,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.340.366.281.000,00	2.092.558.622.879,00	89,41	2.059.980.280.796,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	2.328.865.618.000,00	2.081.057.959.879,00	89,36	2.059.980.280.796,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	11.500.663.000,00	11.500.663.000,00	100,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.049.221.997.235,00	1.058.394.103.240,00	100,87	917.593.972.448,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	874.221.997.235,00	912.619.667.280,00	104,39	917.593.972.448,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	175.000.000.000,00	145.774.435.960,00	83,30	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	81.940.932.125,00	67.833.364.857,00	82,78	138.993.904.317,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0	6.450.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	81.940.932.125,00	67.833.364.857,00	82,78	132.543.904.317,00
5	BELANJA DAERAH	7.668.720.191.488,00	6.047.219.172.842,00	78,86	4.499.145.144.311,87
5.1	BELANJA OPERASI	5.279.980.643.883,00	4.411.464.936.830,00	83,55	3.833.501.098.374,87
5.1.01	Belanja Pegawai	2.134.996.730.799,00	1.859.028.874.764,00	87,07	1.703.889.945.639,87
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.712.957.639.891,00	2.358.928.562.847,00	86,95	1.823.152.911.869,00
5.1.05	Belanja Hibah	358.464.172.272,00	136.605.348.219,00	38,11	254.800.940.866,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	73.562.100.921,00	56.902.151.000,00	77,35	51.657.300.000,00
5.2	BELANJA MODAL	2.325.507.184.562,00	1.617.535.812.652,00	69,56	574.604.617.139,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	389.660.417.050,00	193.037.001.685,00	49,54	26.369.688.405,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	450.144.576.665,00	413.338.138.958,00	91,82	228.537.294.179,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	390.122.762.424,00	325.942.923.423,00	83,55	139.454.699.511,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.080.109.067.923,00	670.339.241.437,00	62,06	176.879.177.157,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.470.360.500,00	14.878.507.149,00	96,17	3.363.757.887,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	63.232.363.043,00	18.218.423.360,00	28,81	91.039.428.798,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	63.232.363.043,00	18.218.423.360,00	28,81	91.039.428.798,00
	SURPLUS / DEFISIT	(1.146.596.420.714,00)	(597.878.586.119,15)	0	523.935.202.296,42



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.146.596.420.714,00	1.146.423.416.682,23	99,98	622.661.218.417,83
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.146.596.420.714,00	1.146.423.416.682,23	99,98	622.661.218.417,83
	PEMBIAYAAN NETTO	1.146.596.420.714,00	1.146.423.416.682,23	99,98	622.661.218.417,83
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	548.544.830.563,08	0	1.146.596.420.714,25

WALIKOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


YUNITA SARI, SH
Pembina
NIP. 19700622 200701 2 031



PEMERINTAH KOTA MEDAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	6.522.123.770.774,00	5.449.340.586.722,85	(1.072.783.184.051,15)	83,55	
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.050.594.560.414,00	2.230.554.495.746,85	(820.040.064.667,15)	73,12	
00.0.00.00.4.1.01	Pajak Daerah	2.587.779.709.433,00	1.961.927.116.116,00	(625.852.593.317,00)	75,82	
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	237.897.911.754,00	113.129.542.274,00	(124.768.369.480,00)	47,55	
00.0.00.00.4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.941.152.227,00	17.677.645.359,53	(6.263.506.867,47)	73,84	
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	200.975.787.000,00	137.820.191.997,32	(63.155.595.002,68)	68,58	
00.0.00.00.4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.389.588.278.235,00	3.150.952.726.119,00	(238.635.552.116,00)	92,96	
00.0.00.00.4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.340.366.281.000,00	2.092.558.622.879,00	(247.807.658.121,00)	89,41	
00.0.00.00.4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.049.221.997.235,00	1.058.394.103.240,00	9.172.106.005,00	100,87	
00.0.00.00.4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	81.940.932.125,00	67.833.364.857,00	(14.107.567.268,00)	82,78	
00.0.00.00.4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	81.940.932.125,00	67.833.364.857,00	(14.107.567.268,00)	82,78	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	7.668.720.191.488,00	6.047.219.172.842,00	(1.621.501.018.646,00)	78,86	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.261.235.411.513,00	2.837.235.980.025,00	(423.999.431.488,00)	87,00	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.383.696.193,00	7.829.950.368,00	(3.553.745.825,00)	68,78	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.574.731.874,00	3.269.374.373,00	(1.305.357.501,00)	71,47	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.528.175.274,00	3.269.374.373,00	(1.258.800.901,00)	72,20	
01.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	56.130.000,00	54.040.000,00	(2.090.000,00)	96,28	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.472.045.274,00	3.215.334.373,00	(1.256.710.901,00)	71,90	
01.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	46.556.600,00	0,00	(46.556.600,00)	0	
01.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.556.600,00	0,00	(46.556.600,00)	0	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	288.421.700,00	272.837.200,00	(15.584.500,00)	94,60	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	288.421.700,00	272.837.200,00	(15.584.500,00)	94,60	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.421.700,00	272.837.200,00	(15.584.500,00)	94,60	
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.347.485.450,00	944.100.886,00	(403.384.564,00)	70,06	
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.347.485.450,00	944.100.886,00	(403.384.564,00)	70,06	
01.2.01.06.5.1.01	Belanja Pegawai	33.320.000,00	32.310.000,00	(1.010.000,00)	96,97	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	3.857.157.000,00	2.559.817.663,00	(1.297.339.337,00)	66,37	
11.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.857.157.000,00	2.559.817.663,00	(1.297.339.337,00)	66,37	
11.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.857.157.000,00	2.559.817.663,00	(1.297.339.337,00)	66,37	
11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	9.250.838.768,00	9.199.303.707,00	(51.535.061,00)	99,44	
11.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.350.071.600,00	1.343.974.680,00	(6.096.920,00)	99,55	
11.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.350.071.600,00	1.343.974.680,00	(6.096.920,00)	99,55	
11.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	7.900.767.168,00	7.855.329.027,00	(45.438.141,00)	99,42	
11.2.01.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.900.767.168,00	7.855.329.027,00	(45.438.141,00)	99,42	
11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	200.000.000,00	199.540.000,00	(460.000,00)	99,77	
11.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	199.540.000,00	(460.000,00)	99,77	
11.2.01.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	199.540.000,00	(460.000,00)	99,77	
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	10.650.000.000,00	9.465.302.124,00	(1.184.697.876,00)	88,88	
12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	10.500.000.000,00	9.340.652.124,00	(1.159.347.876,00)	88,96	
12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	10.500.000.000,00	9.340.652.124,00	(1.159.347.876,00)	88,96	
12.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.500.000.000,00	9.340.652.124,00	(1.159.347.876,00)	88,96	
12.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000.000,00	9.340.652.124,00	(1.159.347.876,00)	88,96	
12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	124.650.000,00	(25.350.000,00)	83,10	
12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	150.000.000,00	124.650.000,00	(25.350.000,00)	83,10	
12.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	124.650.000,00	(25.350.000,00)	83,10	
12.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	124.650.000,00	(25.350.000,00)	83,10	
	SURPLUS / DEFISIT	(1.146.596.420.714,00)	(597.878.586.119,15)	548.717.834.594,85	0	
	PEMBIAYAAN					
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.146.596.420.714,00	1.146.423.416.682,23	(173.004.031,77)	99,98	
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.146.596.420.714,00	1.146.423.416.682,23	(173.004.031,77)	99,98	
	PEMBIAYAAN NETTO	1.146.596.420.714,00	1.146.423.416.682,23	(173.004.031,77)	99,98	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	548.544.830.563,08	548.544.830.563,08	0	

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


YUNITA SARI, SH
Pembina

NIP. 19700622 200701 2 031

WALIKOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION





PEMERINTAH KOTA MEDAN
REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN

Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.855.976.385.353,00	1.679.694.892.809,00	0,00	0,00
		2.202.298.095.795,00	1.191.177.056.471,00	0,00	0,00
1.01	PENDIDIKAN	1.245.915.570.522,00	160.751.067.633,00	0,00	0,00
		822.343.728.473,00	150.043.161.459,00	0,00	0,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	790.928.443.881,00	3.678.467.200,00	0,00	0,00
		597.850.978.298,00	3.414.728.957,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.463.247.829,00	49.616.600,00	0,00	0,00
		885.779.980,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	195.669.880,00	46.556.600,00	0,00	0,00
		92.040.400,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37.741.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.229.836.749,00	3.060.000,00	0,00	0,00
		793.739.580,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	767.229.858.727,00	0,00	0,00	0,00
		579.320.013.166,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	766.684.858.727,00	0,00	0,00	0,00
		579.197.414.166,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		122.599.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.889.025.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.308.464.995,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	7.143.740.520,00	0,00	0,00	0,00
		6.096.003.395,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8.495.284.480,00	0,00	0,00	0,00
		5.985.556.600,00	0,00	0,00	0,00



KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	310.901.500,00	0,00	0,00	0,00
		298.775.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	329.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.700.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		5.279.980.643.883,00	2.325.507.184.562,00	63.232.363.043,00	0,00
		4.411.464.936.830,00	1.617.535.812.652,00	18.218.423.360,00	0,00

WALIKOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


YUNITA SARI, SH
Pembina

NIP. 19700622 200701 2 031

